

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Sedangkan pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.

Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, kesejahteraan masyarakat yang semakin adil dan merata serta meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan berikutnya. Dengan diberlakukannya UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka telah terjadi perubahan sistem penyelenggaraan pemerintah di Indonesia yang sebelumnya menganut sistem sentralistik menjadi sistem desentralistik. Tentu saja, keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah sekarang ini dan di masa akan datang

ditentukan dari peran aktif dan inovatif dari pemerintah daerah itu sendiri.

Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.

Perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi terutama kepemilikan barang modal (*capital stock*). Pihak (kelompok masyarakat) yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula. Menurut teori neoklasik, perbedaan pendapatan dapat dikurangi melalui proses penyesuaian otomatis, yaitu melalui proses “penetasan” hasil pembangunan ke bawah (*trickle down*) dan kemudian menyebar sehingga menimbulkan keseimbangan baru.

Perencanaan pembangunan ekonomi pada umumnya berorientasi pada masalah pertumbuhan (*growth*). Hal ini bisa dimengerti mengingat penghalang utama bagi pembangunan negara sedang berkembang adalah kekurangan modal. Jika kekurangan modal ini bisa teratasi, maka proses pembangunan di negara-negara sedang berkembang akan lebih cepat mencapai sasaran, pembangunan nasional juga sangat tertopang dengan pembangunan daerah.

Angka kemiskinan di Jawa Tengah masih sangat tinggi. Data BPS bulan September tahun 2012 menunjukkan angka 4,863 juta orang (14,98 persen) berada di bawah garis kemiskinan. Jumlah ini sebagian besar bertempat tinggal di pedesaan (16,55 persen) , tetapi ada pula kemiskinan di perkotaan (13,11 persen). Adapun pendapatan perkapita penduduk miskin Jawa Tengah pada angka Rp. 233.769,- per kapita per bulan dengan rincian Rp. 245.817,- per kapita per bulan untuk daerah perkotaan, dan Rp. 223.622,- per kapita per bulan untuk daerah pedesaan. Sistem distribusi pendapatan menentukan bagaimana pendapatan wilayah yang tinggi mampu menciptakan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam kehidupan bernegara, seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesulitan-kesulitan lain dalam masyarakat. Distribusi pendapatan yang tidak merata tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum. Sistem distribusi yang tidak proporsional hanya akan menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu saja, sehingga ini menjadi isu sangat penting dalam menyikapi tingginya angka kemiskinan hingga saat ini. Untuk itulah peneliti tertarik menganalisis masalah distribusi pendapatan antar daerah di provinsi Jawa Tengah dalam skripsi yang berjudul “Analisis Distribusi Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana distribusi pendapatan pada tingkat wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2011?
2. Bagaimana distribusi pendapatan antar daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah;

1. Mengukur dan menganalisis distribusi pendapatan pada tingkat wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2011
2. Mengukur dan menganalisis distribusi pendapatan antar daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada

1. Pemerintah daerah tingkat I provinsi Jawa Tengah dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan distribusinya agar lebih merata.
2. Bappeda tingkat I provinsi Jawa Tengah dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan program-program untuk mengentaskan kemiskinan.
3. Dinas kependudukan daerah tingkat I provinsi Jawa Tengah dalam menentukan kebijakan untuk mengatur pengendalian jumlah penduduk

sehingga pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat memperbaiki kesejahteraan penduduk.

4. Referensi penelitian yang terkait di masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

1. Metode pengumpulan data

Data produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah penduduk, PDRB Perkapita yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan distribusinya di propinsi Jawa Tengah dikumpulkan melalui studi pustaka. Studi pustaka dilakukan di kantor BPS provinsi Jawa Tengah dan dinas-dinas pemerintah lainnya yang terkait.

2. Metode analisis data

Metode analisis data untuk mengetahui distribusi pendapatan di provinsi Jawa Tengah apakah merata atau tidak, digunakan alat analisis Koefisien Gini. Istilah Koefisien Gini mengambil nama dari ahli statistik Italia yang merumuskannya pertama kali pada tahun 1912. Koefisien Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) sampai satu (ketimpangan sempurna). Koefisien Gini merupakan salah satu ukuran yang memenuhi empat kriteria yang sangat dicari, yaitu prinsip anonimitas, independensia skala, independensi populasi dan transfer. Rumus koefisien Gini (Widodo, 1990):

$$GC = 1 - \sum_{i=1}^n . (X_{i+1} - X_i)(Y_i + Y_{i+1})$$

Atau

$$GC = 1 - \sum_{i=1}^n . f_i(Y_{i+1} + Y_i)$$

Keterangan:

GC = Angka *Gini Coefficient*

X_i = Proporsi jumlah responden kumulatif dalam kelas i

f_i = Proporsi jumlah responden dalam kelas i

Y_i = Proporsi jumlah pendapatan responden kumulatif dalam kelas i

Adapun kriteria koefisien Gini adalah dikatakan ketimpangan rendah jika $GC < 0,35$ sementara ketimpangan sedang jika $0,35 < GC < 0,5$ serta ketimpangan tinggi jika $GC > 0,5$.

Guna untuk mengetahui distribusi pendapatan antar daerah di Provinsi Jawa Tengah dapat dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan Williamson yang dikenalkan oleh Jeffrey G. Williamson merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur tingkat ketimpangan daerah atau disparitas pendapatan di suatu wilayah. Menurut Sjafrizal (2008:107), indeks ketimpangan Williamson adalah analisis yang digunakan sebagai indeks ketimpangan regional, dengan menggunakan produk domestik bruto (PDRB) perkapita sebagai data dasar. Adapun indeks williamson diformulasikan sebagai berikut

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{\bar{Y}}$$

Keterangan:

Y_i = PDRB per kapita di kabupaten ke i

\bar{Y} = PDRB rata-rata per kapita di Provinsi

f_i = jumlah penduduk kabupaten ke i

n = jumlah penduduk Provinsi

Indeks Williamson menggunakan PDRB perkapita dan jumlah penduduk dimana nilai yang diperoleh antara nol dan satu atau ($0 < IW < 1$). Dengan kriteria bahwa apabila angka indeks Williamson semakin mendekati nol maka menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil dan bila angka indeks Williamson semakin jauh dari nol maka akan menunjukkan ketimpangan yang makin lebar.

Adapun secara detil kriteria indek wilayah yaitu besarnya IW adalah $0 < IW < 1$

$IW=0$, berarti pembangunan wilayah sangat merata

$IW=1$, berarti pembangunan wilayah sangat tidak merata

(kesenjangan sempurna)

$IW \sim 0$, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati merata

$IW \sim 1$, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati tidak merata

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Penelitian ini dipaparkan sebagai berikut ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Bab ini tentang tinjauan pustaka yang memberi penjelasan, serta review penelitian terdahulu yang mendukung penelitian, dilanjutkan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Penelitian ini membahas tentang jenis data, sumber data, dan metode analisis data.

BAB : ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

IV Bab ini menguraikan mengenai analisis data penelitian, pengujian hipotesis, dan interpretasi data serta pembahasan atas hasil analisis dan intepretasi data yang dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran serta implikasi hasil penelitian baik bagi pemerintah , pihak- pihak yang bersangkutan maupun bagi penelitian selanjutnya.